

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini berangkat dari pertanyaan mengenai hubungan antara dukungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta terhadap Persija Jakarta dengan upaya membangun citra politik Gubernur DKI Jakarta. Berdasarkan hasil analisis data wawancara, studi pustaka, dan kajian teori, penelitian ini menyimpulkan bahwa dukungan BUMD terhadap Persija tidak dapat dipahami semata sebagai kebijakan olahraga atau kerja sama bisnis. Dukungan tersebut merupakan bagian dari praktik politisasi olahraga yang terstruktur dan bermuatan politik simbolik, di mana olahraga dimanfaatkan sebagai medium untuk membangun kedekatan antara pemerintah daerah dan masyarakat.

Dukungan yang diberikan oleh BUMD seperti Bank DKI, PAM Jaya, MRT Jakarta, dan Jakpro menunjukkan keterlibatan aktif institusi publik daerah dalam menopang eksistensi Persija Jakarta. Bentuk dukungan tersebut meliputi sponsorship finansial, penempatan logo BUMD pada atribut klub, penyediaan fasilitas Jakarta International Stadium (JIS), integrasi transportasi publik menuju stadion, hingga program promosi dan diskon bagi suporter. Secara formal, kerja sama ini dibingkai sebagai hubungan business to business yang tidak menggunakan dana APBD secara langsung. Namun secara substansial, posisi BUMD sebagai instrumen ekonomi pemerintah daerah menempatkan dukungan tersebut tetap berada dalam ranah kebijakan publik dan relasi kekuasaan.

Dalam kerangka teori kekuasaan Steven Lukes, penelitian ini menemukan bahwa politisasi olahraga melalui dukungan BUMD bekerja pada tiga dimensi kekuasaan secara simultan. Pada dimensi pertama, dukungan tersebut merupakan hasil keputusan politik pemerintah daerah yang secara sadar mengarahkan sumber daya institusional untuk mendukung Persija. Pada dimensi kedua, pemerintah berhasil mengendalikan agenda publik dengan membingkai dukungan sebagai pembinaan olahraga dan kebanggaan kota, sehingga potensi perdebatan kritis mengenai konflik kepentingan dan fungsi

pelayanan publik BUMD tidak menjadi isu utama di ruang publik. Sementara itu, dimensi ketiga menunjukkan bagaimana dukungan BUMD membentuk preferensi publik melalui simbol, emosi kolektif, dan narasi identitas kota.

Penelitian ini juga menegaskan bahwa Persija Jakarta memiliki posisi strategis sebagai simbol identitas kolektif warga Jakarta dengan basis suporter yang besar, loyal, dan terorganisir. Dukungan BUMD terhadap Persija tidak hanya memperkuat citra pemerintah sebagai pihak yang peduli terhadap olahraga, tetapi juga membangun legitimasi politik melalui kedekatan simbolik dengan masyarakat. Politisasi yang terjadi tidak bersifat mobilisasi elektoral langsung, melainkan bekerja dalam jangka menengah dan panjang melalui pembentukan citra, simpati, dan penerimaan publik. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa dukungan BUMD terhadap Persija pada masa kepemimpinan Pramono–Rano merupakan bentuk politisasi olahraga yang menghasilkan kekuasaan simbolik dan memperlihatkan semakin kaburnya batas antara kebijakan publik, kepentingan ekonomi daerah, dan strategi politik lokal.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka muncul beberapa saran yang terbagi menjadi saran praktis dan saran teoritis, yaitu:

5.2.1 Saran Praktis

Secara praktis, penelitian ini menyarankan agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama pengelola BUMD menyusun regulasi yang lebih jelas, tegas, dan transparan terkait keterlibatan perusahaan daerah dalam mendukung klub olahraga profesional. Penegasan batas antara pembinaan olahraga, kerja sama bisnis, dan kepentingan politik menjadi penting agar fungsi utama BUMD sebagai penyedia layanan publik dan penggerak ekonomi daerah tidak terdistorsi oleh kepentingan pencitraan kekuasaan. Regulasi yang jelas juga diperlukan untuk mencegah potensi konflik kepentingan serta memastikan bahwa setiap bentuk dukungan berada dalam koridor tata kelola yang baik.

Bagi pengelola BUMD dan Persija Jakarta, penelitian ini menekankan pentingnya profesionalisme dan akuntabilitas dalam menjalin kerja sama.

BUMD perlu memastikan bahwa setiap kemitraan didasarkan pada perencanaan bisnis yang terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik melalui mekanisme evaluasi dan pelaporan kinerja yang terbuka. Sementara itu, Persija Jakarta perlu menjaga independensi kelembagaan dan identitas klub agar tidak terjebak dalam ketergantungan berlebihan terhadap dukungan institusional pemerintah, sehingga profesionalisme klub dan kepercayaan suporter dapat terjaga dalam jangka panjang.

Terakhir, penelitian ini mendorong masyarakat dan komunitas suporter untuk mengembangkan kesadaran kritis dalam menyikapi kedekatan antara olahraga dan politik. Dukungan terhadap klub tidak semestinya berujung pada penerimaan tanpa refleksi terhadap kebijakan publik yang menyertainya. Dengan sikap kritis tersebut, olahraga dapat tetap menjadi ruang kebanggaan dan solidaritas sosial, sekaligus berfungsi sebagai bagian dari kehidupan demokrasi lokal yang sehat dan partisipatif.

5.2.2 Saran Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini menyarankan agar kajian ilmu politik, khususnya politik lokal dan politik olahraga, semakin membuka ruang analisis terhadap peran institusi publik daerah dalam praktik politisasi olahraga. Penelitian ini menunjukkan bahwa politisasi olahraga tidak selalu terjadi melalui mobilisasi massa secara eksplisit atau kampanye elektoral langsung, tetapi juga dapat berlangsung melalui mekanisme kebijakan, dukungan kelembagaan, dan penggunaan simbol-simbol kultural yang melekat pada identitas publik.

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas pendekatan teori kekuasaan Steven Lukes dengan mengkaji secara komparatif praktik politisasi olahraga di berbagai daerah atau pada cabang olahraga lain. Selain itu, kajian mendatang dapat mengombinasikan teori politisasi dengan perspektif ekonomi politik untuk melihat lebih dalam bagaimana sumber daya publik, perusahaan daerah, dan kepentingan elite berinteraksi dalam arena olahraga. Dengan demikian, studi politik olahraga tidak hanya berhenti pada aspek simbolik, tetapi juga mampu membongkar relasi struktural yang menopang praktik kekuasaan tersebut.